

LAPORAN KEUANGAN *AUDITED*
BAGIAN ANGGARAN 055
PERIODE TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BAGIAN ANGGARAN 055

**LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019
*(Audited)***

Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian PPN/Bappenas. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 12 Mei 2020

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 



Suharso Monoarfa

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran Pendukung	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya	63
VI. Lampiran	

Tabel 1 Penggolongan Kualitas Piutang	13
Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	16
Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	17
Tabel 4 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja per 31 Desember 2019	18
Tabel 5 Rincian Anggaran per Program per 31 Desember 2019	18
Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019.....	19
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	19
Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019.....	20
Tabel 9 Rincian Belanja Berdasarkan Program per 31 Desember 2019.....	21
Tabel 10 Rincian Belanja Berdasarkan Bagian Anggaran per 31 Desember 2019	21
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	21
Tabel 12 Total Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri Kas (Termasuk Belum Proses SPHL).....	22
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	23
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	24
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	24
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	25
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	25
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	26
Tabel 19 Rincian Pembagian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah	27
Tabel 20 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	28
Tabel 21 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	28
Tabel 22 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019	30
Tabel 23 Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	30
Tabel 24 Saldo Persediaan pada Satuan Kerja	31
Tabel 25 Mutasi Aset Tetap Berupa Tanah.....	32
Tabel 26 Mutasi Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin	33
Tabel 27 Mutasi Transaksi Terhadap Gedung dan Bangunan	34
Tabel 28 Mutasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan	35
Tabel 29 Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya.....	36
Tabel 30 Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	37
Tabel 31 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per per 31 Desember 2019	37
Tabel 32 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019.....	38
Tabel 33 Rincian Aset Tak Berwujud per per 31 Desember 2019.....	39
Tabel 34 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud.....	39
Tabel 35 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	40
Tabel 36 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2019	40
Tabel 37 Mutasi Aset Lain-lain	40

Tabel 38 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019	41
Tabel 39 Perbandingan Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	43
Tabel 40 Perbandingan PNBPN Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	43
Tabel 41 Selisih Nilai PNBPN Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019	44
Tabel 42 Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	44
Tabel 43 Perbandingan Beban Pegawai pada LO dan LRA per 31 Desember 2019....	44
Tabel 44 Selisih Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	45
Tabel 45 Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	45
Tabel 46 Perbandingan Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019	45
Tabel 47 Selisih Nilai Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019 ...	46
Tabel 48 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	46
Tabel 49 Perbandingan Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA 31 Desember 2019	47
Tabel 50 Selisih Nilai Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 31 Desember 2019	48
Tabel 51 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	49
Tabel 52 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	49
Tabel 53 Selisih Nilai Rincian Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019	50
Tabel 54 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	50
Tabel 55 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA 31 Desember 2019.....	50
Tabel 56 Selisih Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 31 Desember 2019	51
Tabel 57 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	52
Tabel 58 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada LO dan LRA per 31 Desember 2019	52
Tabel 59 Selisih Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	52
Tabel 60 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	53
Tabel 61 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	53
Tabel 62 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	53
Tabel 63 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	54
Tabel 64 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	54
Tabel 65 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	55
Tabel 66 Selisih Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	55

Tabel 67 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	55
Tabel 68 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	55
Tabel 69 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	57
Tabel 70 Rincian Koreksi atas Reklasifikasi.....	58
Tabel 71 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	58
Tabel 72 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	58
Tabel 73 Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi.....	59
Tabel 74 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	59
Tabel 75 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per Satker	60
Tabel 76 Rincian Ditagihkan dari Entitas Lain (DKEL) per Satker.....	60
Tabel 77 Rincian Transfer Masuk per Satker	61
Tabel 78 Rincian Transfer Keluar per Satker	61
Tabel 79 Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker.....	62
Tabel 80 Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per Satker.....	62
Tabel 81 Indikasi Konvergensi Implementasi Kegiatan <i>Stunting</i> DIPA Bappenas	64

DAFTAR GRAFIK

Halaman

1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019.....20

LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
2. Daftar Penerimaan Hibah Langsung
3. Daftar Kas Lainnya dan Setara Kas
4. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)
5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima
6. Daftar Piutang Bukan Pajak
7. Daftar Piutang Sewa Rumah Dinas, Sewa Gedung, Penyusutan Piutang Tidak Tertagih, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (BL TGR) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) & BOT
8. Daftar Rincian Persediaan
9. Laporan SIMAK – BMN
10. Daftar Barang Milik Negara Yang Rusak Berat
11. Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga
12. Daftar Pendapatan Diterima Dimuka
13. Daftar Pinjaman dan Hibah
14. Daftar Rekening Pemerintah
15. Daftar Rekening Lainnya

LAMPIRAN PENDUKUNG

16. Neraca Percobaan
17. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
18. Daftar Realisasi Satuan Kerja Pusat
19. Daftar Realisasi Dana Dekonsentrasi
20. Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran
21. Laporan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK Atas LKKL Tahun 2018
22. Rencana Tindak Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK Atas LKKL Tahun 2018
23. Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Bagian Satker
24. Pernyataan Tanggung Jawab Unit Badan Lainnya Bagian Satker
25. Daftar Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah
26. Nota Kesepakatan Angka Asersi Final




**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 12 Mei 2020

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Suharso Monoarfa

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Semester II Tahun Anggaran 2019 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2019 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 4.895.435.183,00 dan estimasi Pendapatan-LRA adalah sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.580.198.695.165,00 atau mencapai 86 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.837.259.507.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.634.532.431.543,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp137.791.560.550,00, Aset Tetap (*Netto*) sebesar Rp1.925.370.101.409,00, Piutang Jangka Panjang (*Netto*) sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya (*Netto*) sebesar Rp571.370.769.584,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.782.213.767,00 dan Rp2.629.750.217.776,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp526.895.890,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.119.814.914.704,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional

senilai Rp(3.119.288.018.814,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp2.038.358.707,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(3.117.249.660.107,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp1.606.311.148.017,00. Mutasi selama Semester II Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Defisit-LO sebesar Rp(3.117.249.660.107,00), koreksi-koreksi senilai Rp1.733.431.226.092,00, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.407.257.503.774,00. Sehingga Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp2.629.750.217.776,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun Anggaran 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

|

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2019
DAN 31 DESEMBER 2018**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	% thd Angg	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	4.895.435.183	0	5.823.020.488
JUMLAH PENDAPATAN		-	4.895.435.183	0	5.823.020.488
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	176.117.062.000	169.235.794.623	96	155.691.045.921
Belanja Barang	B.4	1.336.435.220.000	1.129.733.334.979	85	2.306.280.180.629
Belanja Modal	B.5	324.707.225.000	281.229.565.563	87	59.356.839.440
JUMLAH BELANJA		1.837.259.507.000	1.580.198.695.165	86	2.521.328.065.990

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Koce Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 02/05/20 7:49 PM
Halaman : 1
Prig ID : lap_jra_face_kl_komparatif --rekon17

NO	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	4,895,435,183	(4,895,435,183)	0	500,237,000	5,823,020,488	(5,322,783,488)	1164
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	4,895,435,183	(4,895,435,183)	0	500,237,000	5,823,020,488	(5,322,783,488)	1164
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	176,117,062,000	169,235,794,623	6,881,267,377	96	167,258,434,000	155,691,045,921	11,567,388,079	93
	BELANJA BARANG	1,336,435,220,000	1,129,733,334,979	206,701,885,021	85	2,387,006,898,000	2,306,280,180,629	80,726,717,371	97
	BELANJA MODAL	324,707,225,000	281,229,565,563	43,477,659,437	87	545,458,569,000	59,356,839,440	486,101,729,560	11
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,837,259,507,000	1,580,198,695,165	257,060,811,835	86	3,099,723,901,000	2,31,328,065,990	578,395,835,010	81
C	PEMBIAYAAN				0				0

20

NERACA

II

II. NERACA

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	38.136.194	205.713.244
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	5.967.367.257	26.811.835.914
Belanja Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>)	C.3	43.207.682.176	28.553.827.881
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	2.287.530	224.200
Piutang PNB	C.5	-	3.516.480
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.6	51.805.080	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.7	(259.025)	(17.582)
Persediaan	C.8	88.524.541.338	1.003.556.532.748
Persediaan yang Belum Diregister		-	-
Jumlah Aset Lancar		137.791.560.550	1.059.131.632.885
ASET TETAP			
Tanah	C.9	1.484.443.750.305	180.483.709.805
Peralatan dan Mesin	C.10	433.773.685.330	332.663.047.278
Peralatan dan Mesin Belum Diregister		-	-
Gedung dan Bangunan	C.11	157.938.995.269	144.131.361.953
Gedung dan Bangunan Belum Diregister		-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.12	6.020.002.586	6.507.585.170
Aset Tetap Lainnya	C.13	101.395.867.321	5.379.109.730
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	C.14	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.15	(258.202.199.382)	(257.457.197.160)
Jumlah Aset Tetap		1.925.370.101.409	411.707.616.776
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.16	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.17	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak ketiga	C.18	490.209.375.000	83.647.500.000
Aset Tak Berwujud	C.19	55.783.312.439	49.586.947.884
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	68.180.544.422	62.680.178.299
Aset Lainnya yang Belum Diregister		-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(42.802.462.277)	(38.314.958.551)
Jumlah Aset Lainnya		571.370.769.584	157.599.667.632
JUMLAH ASET		2.634.532.431.543	1.628.438.917.293
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.23	4.546.885.157	21.715.821.483
Hibah Yang Belum Disahkan	C.24	-	5.824.966
Pendapatan Diterima Dimuka	C.25	197.392.416	200.409.583
Uang Muka dari KPPN	C.26	38.136.194	205.713.244
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.782.213.767	22.127.769.276
JUMLAH KEWAJIBAN		4.782.213.767	22.127.769.276
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	2.629.750.217.776	1.606.311.148.017
JUMLAH EKUITAS		2.629.750.217.776	1.606.311.148.017
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.634.532.431.543	1.628.438.917.293

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tgl. Cetak 02/05/2020 7:57 PM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	38,136,194	205,713,244	(167,577,050)	(81.46)
Kas Lainnya dan Setara Kas	5,967,367,257	26,811,835,914	(20,844,468,657)	(77.74)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	43,207,682,176	28,553,827,881	14,653,854,295	51.32
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2,287,530	224,200	2,063,330	920.31
Piutang Bukan Pajak	0	3,516,480	(3,516,480)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(17,582)	17,582	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	3,498,898	(3,498,898)	(100.00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	51,805,080	0	51,805,080	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(259,025)	0	(259,025)	0.00
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	51,546,055	0	51,546,055	0.00
Persediaan	88,524,541,338	1,003,556,532,748	(915,031,991,410)	(91.18)
JUMLAH ASET LANCAR	137,791,560,550	1,059,131,632,885	(921,340,072,335)	(86.99)
ASET TETAP				
Tanah	1,484,443,750,305	180,483,709,805	1,303,960,040,500	722.48
Peralatan dan Mesin	433,773,685,330	332,663,047,278	101,110,638,052	30.39
Gedung dan Bangunan	157,938,995,269	144,131,361,953	13,807,633,316	9.58
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,020,002,566	6,507,585,170	(487,582,604)	(7.49)
Aset Tetap Lainnya	101,395,867,321	5,379,109,730	96,016,757,591	1,784.99
AKUMULASI PENYUSUTAN	(258,202,199,382)	(257,457,197,160)	(745,002,222)	0.29
JUMLAH ASET TETAP	1,925,370,101,409	411,707,616,776	1,513,662,484,633	367.65
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	490,209,375,000	83,647,500,000	406,561,875,000	486.04
Aset Tak Berwujud	55,783,312,439	49,586,947,884	6,196,364,555	12.50
Aset Lain-lain	68,180,544,422	62,680,178,299	5,500,366,123	8.78
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(42,802,462,277)	(38,314,958,551)	(4,487,503,726)	11.71
JUMLAH ASET LAINNYA	571,370,769,584	157,599,667,632	413,771,101,952	262.55
JUMLAH ASET	2,634,532,431,543	1,628,438,917,293	1,006,093,514,250	61.78
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	4,546,685,157	21,715,821,483	(17,169,136,326)	(79.06)
Hibah Yang Belum Disahkan	0	5,824,966	(5,824,966)	(100.00)
Pendapatan Diterima Dimuka	197,392,416	200,409,583	(3,017,167)	(1.51)
Uang Muka dari KPPN	38,136,194	205,713,244	(167,577,050)	(81.46)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,782,213,767	22,127,769,276	(17,345,555,509)	(78.39)
JUMLAH KEWAJIBAN	4,782,213,767	22,127,769,276	(17,345,555,509)	(78.39)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,629,750,217,776	1,606,311,148,017	1,023,439,069,759	63.71

Handwritten mark

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tgl. Cetak 02/05/2020 7:57 PM
iap_neraca_ki_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH EKUITAS	2,629,750,217,776	1,606,311,148,017	1,023,439,069,759	63.71
JUMLAH EKUITAS	2,629,750,217,776	1,606,311,148,017	1,023,439,069,759	63.71
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,634,532,431,543	1,628,438,917,293	1,006,093,514,250	61.78

21

LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER
2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	526.895.890	516.260.813
JUMLAH PENDAPATAN		526.895.890	516.260.813
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	161.031.193.376	158.912.926.480
Beban Persediaan	D.3	18.275.935.263	10.360.218.882
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.585.356.306.021	2.364.818.950.150
Beban Pemeliharaan	D.5	17.541.575.727	17.469.818.574
Beban Perjalanan Dinas	D.6	365.843.175.874	314.615.332.977
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	903.122.004.477	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	68.644.464.941	65.496.481.486
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	259.025	107.638
JUMLAH BEBAN		3.119.814.914.704	2.931.673.836.187
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.119.288.018.814)	(2.931.157.575.374)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	1.023.539.644	3.310.578.340
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	461.465.409	49.500.000
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		562.074.235	3.261.078.340
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	15.958.915.433	1.115.517.022.144
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	14.482.630.961	1.112.403.779.740
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.476.284.472	3.113.242.404
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.038.358.707	6.374.320.744
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.14	-	-
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.117.249.660.107)	(2.924.783.254.630)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN

055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 02/05/20 8:51 AM
Halaman : 1
Frg ID : lap_io_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	526,895,890	516,260,813	10,635,077	2.06
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	526,895,890	516,260,813	10,635,077	2.06
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	526,895,890	516,260,813	10,635,077	2.06
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	161,031,193,376	158,912,926,480	2,118,266,896	1.333
Beban Persediaan	18,275,935,263	10,360,218,882	7,915,716,381	76.405
Beban Barang dan Jasa	1,585,356,306,021	2,364,818,950,150	(779,462,644,129)	(32.961)
Beban Pemeliharaan	17,541,575,727	17,469,818,574	71,757,153	0.411
Beban Perjalanan Dinas	365,843,175,874	314,615,332,977	51,227,842,897	16.283
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	903,122,004,477	0	903,122,004,477	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

2.

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN

055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 02/05/20 8:51 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lo_kl --

Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	68,644,464,941	65,496,481,486	3,147,983,455	4.806
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	259,025	107,638	151,387	140.645
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,119,814,914,704	2,931,673,836,187	188,141,078,517	6.418
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,119,288,018,814)	(2,931,157,575,374)	(188,130,443,440)	6.418
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	562,074,235	3,261,078,340	(2,699,004,105)	(82.764)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,023,539,644	3,310,578,340	(2,287,038,696)	(69.083)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	461,465,409	49,500,000	411,965,409	832.253
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,476,284,472	3,113,242,404	(1,636,957,932)	(52.58)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	15,958,915,433	1,115,517,022,144	(1,099,558,106,711)	(98.569)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14,482,630,961	1,112,403,779,740	(1,097,921,148,779)	(98.698)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,038,358,707	6,374,320,744	(4,335,962,037)	(68.022)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,117,249,660,107)	(2,924,783,254,630)	(192,466,405,477)	6.581
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,117,249,660,107)	(2,924,783,254,630)	(192,466,405,477)	6.581

th-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2019
DAN 31 DESEMBER 2018**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1	1.606.311.148.017	1.366.285.820.528
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.117.249.660.107)	(2.924.783.254.630)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI			
EKUITAS	E.3	1.733.431.226.092	127.695.483.155
Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	-	127.120.422.226
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.3	(13.638.230.904)	-
Selisih Revaluasi Aset	E.3.4	1.342.010.649.166	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.5	407.852.279.839	1.687.230.149
Koreksi Lain-lain	E.3.6	(2.793.472.009)	(1.112.169.220)
JUMLAH		1.733.431.226.092	127.695.483.155
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.407.257.503.774	3.037.113.098.964
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.023.439.069.759)	(240.025.327.489)
EKUITAS AKHIR	E.5	2.629.750.217.776	1.606.311.148.017

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 02/05/20 7:59 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl--

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,606,311,148,017	1,366,285,820,528	240,025,327,489	17.568
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,117,249,660,107)	(2,924,783,254,630)	(192,466,405,477)	6.581
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	1,733,431,226,092	127,695,483,155	1,605,735,742,937	1,257.4 73
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	127,120,422,226	(127,120,422,226)	(100)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(13,638,230,904)	0	(13,638,230,904)	()
SELISIH REVALUASI ASET	1,342,010,649,166	0	1,342,010,649,166	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	407,852,279,839	1,687,230,149	406,165,049,690	24,072. 89
LAIN-LAIN	(2,793,472,009)	(1,112,169,220)	(1,681,302,789)	151.173
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,407,257,503,774	3,037,113,098,964	(629,855,595,190)	(20.739)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,023,439,069,759	240,025,327,489	783,413,742,270	326.388
EKUITAS AKHIR	2,629,750,217,776	1,606,311,148,017	1,023,439,069,759	63.714

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil &
Kebijakan
Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016, Bappenas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan,

- evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
2. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
3. Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/ Daerah;
4. Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara;
5. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
6. Pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional
7. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
8. Pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS;
10. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan BAPPENAS;
11. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BAPPENAS; dan
12. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di BAPPENAS.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2017, dalam melaksanakan tugasnya Menteri PPN/Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Staf Ahli, Inspektorat Utama, dan Deputi yang masing-masing membidangi bidang-bidang tertentu, serta Pusat.

Susunan Organisasi Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas :

1. Menteri/Kepala;
2. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Ekonomi;
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
7. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
8. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
9. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
10. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
11. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
12. Inspektorat Utama;
13. Staf Ahli;
14. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
15. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
16. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian PPN/Bappenas.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

*Basis
Akuntansi*

A.3. BASIS AKUNTANSI

Kementerian PPN/Bappenas menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang

diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan Jasa Giro diakui pada saat terbitnya rekening koran per akhir bulan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

- Belanja*
- (3) Belanja**
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
 - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - Belanja Hibah diakui pada saat terjadi pengeluaran kas Negara.
- Beban*
- (4) Beban**
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - Beban Hibah diakui pada saat resume tagihan (SP2HL).
- Aset*
- (5) Aset**
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- Aset Lancar*
- a. Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan, mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau

pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada

usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusunan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2h

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dengan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian PPN/Bappenas telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja tersaji sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penyerahan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan		
Belanja		
Belanja Pegawai	176.117.062.000	176.117.062.000
Belanja Barang	1.221.112.615.000	1.336.439.220.000
Belanja Modal	382.924.220.000	324.707.225.000
Jumlah Belanja	1.780.153.797.000	1.837.259.507.000

Sedangkan apabila dilihat dari program Kementerian PPN/Bappenas maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Anggaran per Program per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Program	31 Desember 2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	870.240.000.000	870.240.000.000
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	10.250.000.000	10.250.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	899.663.797.000	956.769.507.000
Jumlah	1.780.153.797.000	1.837.259.507.000

Realisasi
Pendapatan
Rp4.895.435.183,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.895.435.183,00, sedangkan estimasi pendapatan adalah sebesar Rp0,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	32.388.888	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	991.150.756	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	135.922.678	-
Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	-	360.047.373	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.638.200	-
Pendapatan Denda Lainnya	-	30.000.000	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	10.802	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	36.389.578	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	3.270.441.023	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	37.445.535	-
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	350	-
Jumlah	-	4.895.435.183	-

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	32.388.888	46.100.000	-29,74
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	991.150.756	3.264.478.340	-69,64
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	135.922.678	226.119.490	-39,89
Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	360.047.373	360.047.373	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.638.200	94.916.000	-98,27
Pendapatan Denda Lainnya	30.000.000	30.000.000	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Nege	-	31.429.895	-100,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	10.802	1.184.071	-99,99
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	36.389.578	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.270.441.023	1.768.745.319	84,90
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	37.445.535	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	0,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	350	-	0,00
Jumlah	4.895.435.183	5.823.020.488	-15,93

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 antara lain berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu.

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Rp1.580.198.695.165,00

Realisasi Belanja Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.580.198.695.165,00 atau mencapai 86 persen dari anggaran belanja sebesar Rp1.837.259.507.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 tersaji sebagai berikut:

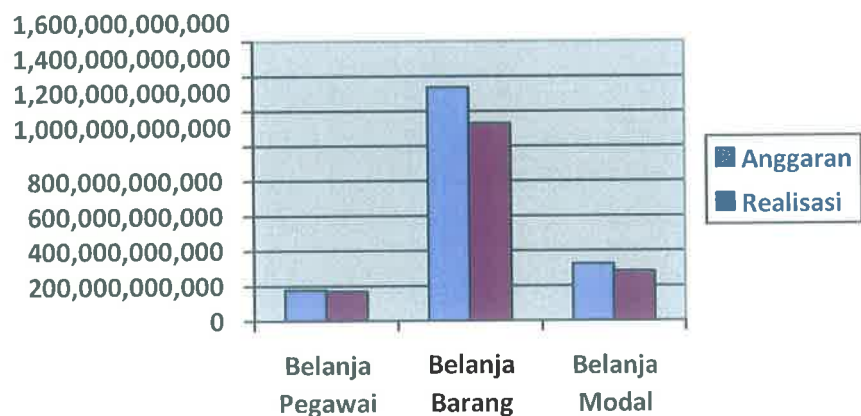
Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	176.117.062.000	169.261.882.924	98,11
Belanja Barang	1.336.435.220.000	1.134.821.487.817	84,91
Belanja Modal	324.707.225.000	281.281.390.563	86,63
Total Belanja Kotor	1.837.259.507.000	1.585.364.761.304	86,29
Pengembalian Belanja	-	(5.166.066.139)	-
Jumlah	1.837.259.507.000	1.580.198.695.165	86,01

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019



Realisasi belanja menurut sumber dana/program/kegiatan, eselon1/wilayah/satker, jenis belanja/eselon1/akun dapat dilihat pada lampiran 1.

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Belanja Berdasarkan Program per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Program	31 Desember 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	870,240,000,000	732,775,764,564	84.204
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	10,250,000,000	9,966,452,348	97.253
Program Perencanaan Bappenas	956,769,507,000	842,620,544,392	88.07
Total	1,837,259,507,000	1,585,364,761,304	86.29
Pengembalian	-	(5,166,066,139)	-
Jumlah	1,837,259,507,000	1,580,198,695,165	86.01

Tabel 10 Rincian Belanja Berdasarkan Bagian Anggaran per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Bagian Anggaran	31 Desember 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
BA 055	1,837,259,507,000	1,585,364,761,304	86.29
Pengembalian	-	(5,166,066,139)	-
Jumlah	1,837,259,507,000	1,580,198,695,165	86.29

Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 37,33 persen dibandingkan per 31 Desember 2018 yaitu Belanja Barang dan yang terjadi kenaikan adalah Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Terdapat Penambahan Jumlah Pegawai CPNS.
2. Terdapat Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan (Gaji dan Tunjangan Kinerja).
3. Terdapat peningkatan penyerapan awal tahun anggaran pada Belanja Modal dan Belanja Barang.

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	169,235,794,623	155,691,045,921	8.70
Belanja Barang	1,129,733,334,979	2,306,280,190,629	(51.01)
Belanja Modal	281,229,565,563	59,356,839,440	373.79
Jumlah	1,580,198,695,165	2,521,328,065,990	(37.33)

Penyerapan anggaran sampai dengan per 31 Desember 2019 telah mencapai Rp1.580.198.695.165,00 atau lebih rendah 37,33 persen dibanding realisasi per 31 Desember 2018.

Jumlah realisasi belanja tersebut termasuk dari hibah langsung uang yang berasal dari Hibah Langsung Luar Negeri Uang yang telah terbit SPHL sebesar Rp41.929.926.053,00 terdiri dari total realisasi belanja Hibah Langsung Luar Negeri Uang Satker Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp12.150.181.267,00 dan Satker MWA-ICCTF sebesar Rp29.779.744.786,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 12 Total Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri Kas (Termasuk Belum Proses SPHL)

(dalam rupiah)	
Uraian	Jumlah
Realisasi belanja hibah langsung uang :	
1. Terbit SPHL	41.929.926.053
2. Belum terbit SPHL	-
3. Belum proses SPHL	851.829.176
Jumlah	42.781.755.229

Realisasi belanja hibah langsung uang yang telah terbit SPHL per 31 Desember 2019 sebesar Rp41.929.926.053,00 berasal dari Satker Bappenas yaitu hibah UNICEF sebesar Rp4.656.686.518,00, Hibah UNFPA sebesar Rp4.193.621.925,00, Hibah READSI sebesar Rp3.299.872.824,00 dan Satker MWA ICCTF yaitu hibah DANIDA sebesar Rp2.480.808.806,00, hibah USAID sebesar Rp7.534.738.695,00 dan hibah DFID-UKCCU sebesar Rp19.764.197.285,00.

Realisasi belanja hibah langsung uang yang belum proses SPHL per 31 Desember 2019 sebesar Rp851.829.176,00 yang merupakan realisasi belanja pada Satker Kementerian PPN/Bappenas (IFAD) Rincian penjelasan dapat dilihat pada lampiran 2.

Dana hibah langsung luar negeri kas tersebut langsung disalurkan oleh Mitra Pembangunan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk membiayai suatu program/kegiatan/proyek tertentu melalui rekening unit pelaksana masing-masing program/kegiatan/proyek di Kementerian PPN/Bappenas. Apabila program/kegiatan/proyek telah selesai (*project closed*) dan masih terdapat sisa dana di rekening, maka dana tersebut disetor kembali ke Mitra Pembangunan.

Akuntabilitas pemanfaatan hibah tetap dapat dipertanggungjawabkan melalui audit yang dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk

oleh Mitra Pembangunan berdasarkan perjanjian hibah (*Grant Agreement*).

Mekanisme pencairan hibah langsung luar negeri kas diatur dalam:

1. *General Guidelines* dari Mitra Pembangunan menetapkan bahwa seluruh ketentuan pelaksanaan hibah mengacu kepada *guideline*.
2. MoU Hibah antara Mitra Pembangunan dan Kementerian PPN/Bappenas menetapkan bahwa penyaluran dana hibah langsung ke rekening yang disetujui oleh Mitra Pembangunan, bukan melalui rekening Kas Umum Negara.

Belanja Pegawai
Rp169.235.794.623,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp169.235.794.623,00 dan Rp155.691.045.921,00 atau terjadi kenaikan sebesar 8,70 persen. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai dan kenaikan pangkat/jabatan pegawai.

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	64.118.386.479	61.481.872.958	4,29
Belanja Lembur	364.357.000	364.675.000	(0,09)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transit	104.779.139.445	93.885.870.153	11,60
Total Belanja Pegawai	169.261.882.924	155.732.418.111	8,69
Pengembalian Belanja Pegawai	(26.088.301)	(41.372.190)	(36,94)
Jumlah Belanja	169.235.794.623	155.691.045.921	8,70

Belanja Barang
Rp1.129.733.334.979,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.129.733.334.979,00 dan Rp2.306.280.180.629,00.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 mengalami penurunan 51,01 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan terjadi penurunan belanja barang pengganti pajak dan belanja jasa.

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	(Dalam Rupiah)		
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	46.177.642.935	30.414.014.965	51,83
Belanja Barang Non Operasional	250.689.064.504	235.364.135.105	6,51
Belanja Barang Pengganti Pajak	-	11.639.419.655	(100,00)
Belanja Barang Persediaan	17.221.683.967	11.911.506.176	44,58
Belanja Jasa	426.656.170.393	1.388.543.087.074	(69,28)
Belanja Pemeliharaan	17.281.445.104	17.722.743.781	(2,49)
Belanja Perjalanan Dinas	335.900.819.048	296.530.909.310	13,28
Belanja Perjalanan Luar Negeri	35.755.458.953	23.683.543.800	50,97
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	4.099.218.100	283.818.549.219	(98,56)
Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah (NonKas)	-	-	-
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.141.104.813	11.109.728.000	(89,73)
Total Belanja Barang	1.134.821.487.817	2.310.737.637.085	(50,89)
Pengembalian Belanja Barang	(5.088.152.838)	(4.457.456.456)	14,15
Jumlah Belanja	1.129.733.334.979	2.306.280.180.629	51,01

Belanja Modal
Rp281.229.565.563,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp281.229.565.563,00 dan Rp59.356.839.440,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 373,79 persen dibandingkan per 31 Desember 2018 karena terdapat pembayaran tunggakan belanja modal tahun 2018 dan peningkatan penyerapan awal tahun anggaran.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	(Dalam Rupiah)		
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.861.560.569	49.860.153.910	250,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.720.209.000	6.388.337.000	(57,42)
Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	103.699.620.994	3.109.298.530	3.235,15
Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah (Non Kas)	-	-	-
Total Belanja Modal	281.281.390.563	59.357.789.440	373,87
Pengembalian Belanja Modal	(51.825.000)	(950.000)	5.355,26
Jumlah Belanja	281.229.565.563	59.356.839.440	373,79

Belanja Modal
Tanah
Rp0,00

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp174.861.560.569,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp174.861.560.569,00 dan Rp49.860.153.910,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 250,70 persen dibandingkan per 31 Desember 2018 karena terdapat pembayaran tunggakan belanja modal tahun 2018 dan peningkatan penyerapan awal tahun anggaran.

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.584.351.569	49.611.584.710	251,90
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	277.209.000	248.969.200	11,52
Jumlah Belanja Kotor	174.861.560.569	49.860.153.910	250,70
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah Belanja	174.861.560.569	49.860.153.910	250,70

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp2.668.384.000,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.668.384.000,00 dan Rp6.387.387.000,00.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 58,22 persen dibandingkan 31 Desember 2018 karena terdapat realokasi belanja rehab gedung.

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.720.209.000	6.388.337.000	(57,42)
Jumlah Belanja Kotor	2.720.209.000	6.388.337.000	(57,42)
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	(51.825.000)	(950.000)	5.355,28
Jumlah Belanja	2.668.384.000	6.387.387.000	(58,22)

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Belanja Modal Lainnya
Rp103.699.620.994,00

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp103.699.620.994,00 dan Rp3.109.298.530,00.

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 3.221,72 persen dibandingkan realisasi per 31 Desember 2018 disebabkan antara lain karena terdapat pembayaran tunggakan belanja modal tahun 2018 dan peningkatan penyerapan awal tahun anggaran.

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	4.345.435.994	2.918.858.530	48,87
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau aset	99.354.185.000	190.440.000	52.070,86
Jumlah Belanja Kotor	103.699.620.994	3.109.298.530	3.235,15
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja	103.699.620.994	3.109.298.530	3.235,15

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp38.136.194,00*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp38.136.194,00 dan Rp205.713.244,00.

Selain itu, terdapat Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) sesuai dengan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan perincian pembagian sebagai berikut :

Tabel 19 Rincian Pembagian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP)

NO	SATKER	PPK	UP KKP (40%)
1	SATKER BAPPENAS	DM I	124.000.000
2		DM II	140.000.000
3		DM III	178.000.000
4		DM IV	80.000.000
5		DM V	50.000.000
6		DM VI	40.000.000
7		03.01 P2A2	108.000.000
8		06.01 PPN I	100.000.000
9		06.02 PPN II	90.000.000
10		06.03 PPN III	90.000.000
11		06.04 PPN IV	98.000.000
12		06.05 PPN V	108.000.000
13		06.06 PPN VI	100.000.000
14		06.07 PPN VII	120.000.000
15		06.08 PPN VIII	78.000.000
16		06.09 PPN IX	110.000.000
17		06.10 PPN X	140.000.000
18		06.11 PPN XI	76.000.000
19		06.12 PPN XII	110.000.000
20		06.14 ICCTF	60.000.000
21	SATKER KNKS	KNKS	200.000.000
22	SATKER ICCTF	ICCTF	200.000.000
23	SATKER MCC	MCC	60.000.000
Total			Rp 2.480.000.000

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp5.967.367.257,00*

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.967.367.257,00 dan Rp26.811.835.914,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau

kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	per 31 Desember 2019	per 31 Desember 2018
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.736.498.862	2.779.754.868
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya dari Hibah	4.230.868.395	24.032.081.048
Jumlah	5.967.367.257	26.811.835.914

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.967.367.257,00 merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.736.498.862,00 dan Kas Lainnya dari Hibah sebesar Rp4.230.868.395,00. Rincian atas akun Kas lainnya dari Hibah adalah sebagai berikut:

Pada Satker Bappenas terdapat saldo kas lainnya dari hibah sudah disahkan sebesar Rp5.082.697.571,00 yang berasal dari proyek UNICEF sebesar Rp3.270.395,00 dan Proyek READSI sebesar Rp5.079.427.176,00. Namun terdapat belanja hibah yang belum disahkan sebesar Rp851.829.176,00 yang mengurangi saldo kas hibah sehingga total kas lainnya dari hibah sebesar Rp4.230.868.395.

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan pada lampiran 3.

C.3. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka
Rp43.207.682.176,00

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp43.207.682.176,00 dan Rp28.553.827.881,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Jenis	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Karyasiswa PHRD	38.053.477.967	28.150.127.881
Karyasiswa PHRD Premium	2.079.816.667	-
Karyasiswa Program Coremap	3.074.387.542	-
Karyasiswa Program Linkage UNHAS-Australia	-	403.700.000
Jumlah	43.207.682.176	28.553.827.881

Data belanja dibayar dimuka akan diperbaharui data secara tahunan sesuai aturan yang berlaku.

Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan pada lampiran 4.

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp2.287.530,00*

C.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.287.530,00 dan Rp224.200,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan pada lampiran 5.

*Piutang PNB
Rp0,00*

C.5. Piutang PNB

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.516.480,00.

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang Bukan Pajak dan perhitungannya disajikan pada lampiran 6.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp51.805.080,00*

C.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp51.805.080,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian TP/TGR disajikan pada lampiran 7.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp(259.025,00)*

C.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(259.025,00) dan Rp17.582,00. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Kualitas	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TPR			
Lancar	259,025	0,50%	1,295
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	259,025	-	1,295
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	259,025		1,595

Persediaan
Rp88.524.541.338,00

C.8. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp88.524.541.338,00 dan Rp1.003.556.532.748,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	4,687,466,842	4,886,559,913
Barang untuk Pemeliharaan	186,435,825	151,802,788
Suku Cadang	33,435,914	72,899,760
Pita Cukai, Material & Legas	1,226,000	-
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	8,597,374,045	9,073,215,553
Hewan dan Tanaman untuk diserahkan kepada masyarakat	2,695,169,710	6,004,949,741
Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat	46,785,182,927	873,936,694,817
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada masyarakat	24,878,944,149	86,058,368,983
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat	442,853,200	20,952,843,800
Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	-	413,690,502
Bahan Baku	713,570	348,587,586
Persediaan Lainnya	235,738,740	1,855,289,325
Jumlah	88.524.541.338	1.003.556.532.748

Saldo akhir tersebut merupakan penggabungan dari Laporan Barang Persediaan 36 (tiga puluh enam) Satuan Kerja, dan khusus untuk Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas menggunakan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh melalui Aplikasi Persediaan dari 20 (dua puluh) Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pembantu Kuasa Pengguna Barang (sesuai

Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan).

Satuan kerja yang masih memiliki saldo persediaan per 31 Desember 2019 yaitu:

Tabel 24 Saldo Persediaan pada Satuan Kerja

Satuan Kerja		Saldo
017312	Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas	5,589,431,199
966009	Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation	66,874,209,492
966010	MWA ICCTF	16,015,685,397
220060	Bappeda Bali	173,100
180060	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1,625,500
160019	BAPPEDA PROP. KAL-TIM	570,000
417951	Komite Nasional Keuangan Syariah	42,846,650
Total		88,524,541,338

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 termasuk persediaan berupa tanah dan bangunan/hewan dan tanaman/peralatan dan mesin/jalan, irigasi dan jaringan/aset lain-lain yang akan diserahkan ke masyarakat yaitu:

- a. Satuan Kerja MWA ICCTF senilai Rp16.015.685.397,00 (enam belas milyar lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yaitu:
 - 1) Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat senilai Rp8.597.374.046,00 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh enam rupiah),
 - 2) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat senilai Rp 2.695.169.719,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah),
 - 3) Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp4.578.746.691,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), dan
 - 4) Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses senilai Rp0,00 (nol rupiah).
 - 5) Suku cadang alat pertanian lainnya dan persediaan lainnya merupakan persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat senilai Rp144.394.941,00.

- b. Satuan Kerja Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation senilai Rp66.850.310.500,00 (enam puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) yaitu:
- 1) Peralatan dan mesin untuk diserahkan senilai Rp41.528.513.151,00 (empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu seratus lima puluh satu rupiah),
 - 2) Aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp24.878.944.149,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), dan
 - 3) Barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat senilai Rp442.853.200,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- c. Satuan kerja Kementerian PPN/Bappenas senilai peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke masyarakat Rp677.922.685,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Rincian Persediaan disajikan pada lampiran 8.

Tanah
Rp1.484.443.750.305,00

C.9. Tanah

Tanah yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.484.443.750.305,00 dan Rp180.483.709.805,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Tabel 25 Mutasi Aset Tetap Berupa Tanah

(Dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	180,483,709,805
Mutasi tambah :	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	1,177,775,324,500
Koreksi Kesalahan input IP	126,184,716,000
Mutasi Kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2019	1,484,443,750,305

Mutasi tambah:

1. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018.

2. Koreksi Kesalahan input IP → transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017 - 2018 yang sebelumnya telah direkam, namun belum tepat nilainya. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang telah terbit pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Rincian Tanah per 31 Desember 2019 disajikan pada lampiran 9.

Peralatan dan Mesin
Rp
433.773.685.330,00

C.10. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp433.773.685.330,00 dan Rp332.663.047.278,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 26 Mutasi Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)	
Saldo per 31 Desember 2018	332,663,047,278
Mutasi tambah:	
Penambahan Saldo Awal	9.200.000
Pembelian	158,292,662,176
Pengembangan Nilai Aset	300,755,200
Hibah (Masuk)	366,482,577
Reklasifikasi Masuk	1,161,020,160
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	4.000
Pembelian Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	-
Mutasi kurang:	
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	(203,620,218)
Penghentian aset dari penggunaan	(20,655,656,195)
Reklasifikasi Keluar	(1,161,020,160)
Transfer Keluar	(36,451,538,074)
Hibah (Keluar)	(336,425,155)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(1,786,923)
Penghapusan	(104,565,000)
Aset Ekstrakomptabel	(104,874,336)
Saldo per 31 Desember 2019	433,773,685,330
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(236,258,194,736)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	197,515,490,594

Mutasi tambah:

- Saldo Awal → transaksi perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh tahun sebelumnya.
- Pembelian → transaksi perolehan peralatan dan mesin yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satker MCC, Satker ICCTF, Satker Komite Nasional Keuangan Syariah dan Satker Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas.
- Hibah (masuk) → merupakan transaksi untuk membukukan perolehan BMN yang berasal dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat dan dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

4. Pengembangan nilai aset → transaksi pengembangan (rehabilitasi/restorasi) peralatan dan mesin yang menambah nilai buku sebelumnya;
5. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas → merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari perbaikan atas ke salahan Pembukuan berupa nilai.

Mutasi Kurang:

1. Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap → Saldo minus.
2. Penghentian Aset dari Penggunaan → transaksi penghentian aset merupakan transaksi atas peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat dan dalam proses penghapusan dengan cara pemindahtanganan.
3. Transfer Keluar → merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari penyerahan BMN ke Kuasa Pengguna Barang lain. Adapun rincian transaksi transfer keluar yaitu Alih status dari Satuan Kerja Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2019 disajikan pada lampiran 9.

C.11. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp
157.938.995.269,00

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp157.938.995.269,00 dan Rp144.131.361.953,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Mutasi Transaksi Terhadap Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)	
Saldo per 31 Desember 2018	144.131.361.953
Mutasi tambah :	
Pembelian	198.392.000
Pengembangan Nilai Aset	2.105.993.023
Selisih Revaluasi Aset Tetap	13.035.719.906
Mutasi kurang :	
Koreksi Kesalahan input IP	(1.131.106.000)
Koreksi Revaluasi	(30.226.000)
Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya	(371.139.613)
Saldo per 31 Desember 2019	157.938.995.269
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	18.822.558.857
Nilai Buku per 31 Desember 2019	139.116.436.412

Mutasi tambah:

1. Pembelian → transaksi perolehan gedung yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satker MCC, Satker ICCTF,

87-

Satker Komite Nasional Keuangan Syariah dan Satker Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas.

2. Pengembangan Nilai Aset: transaksi pengembangan (rehabilitasi/renovasi/restorasi) gedung dan bangunan yang menambah nilai buku sebelumnya.
3. Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018.

Mutasi kurang:

1. Koreksi Kesalahan input IP → transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017 - 2018 yang sebelumnya telah direkam, namun belum tepat nilainya. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang telah terbit pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada lampiran 9.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp6.020.002.566,00

C.12. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.020.002.566,00 dan Rp6.507.585.170,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Mutasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(Dalam Rupiah)	
Saldo per 31 Desember 2018	6.507.585.170
Mutasi tambah :	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	1.622.161.396
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	5.057.000
Mutasi kurang :	-
Koreksi Kesalahan input IP	(2.109.744.000)
Transaksi Normalisasi BMN	(5.057.000)
Saldo per 31 Desember 2019	6.020.002.566
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	3.121.445.789
Nilai Buku per 31 Desember 2019	2.898.556.777

Mutasi tambah:

1. Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018.

eh-

Mutasi kurang:

1. Koreksi Kesalahan input IP → transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017 - 2018 yang sebelumnya telah direkam, namun belum tepat nilainya. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang telah terbit pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada lampiran 9.

C.13. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp101.395.867.321,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp101.395.867.321,00 dan Rp5.379.109.730,00.

Tabel 29 Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)	
Saldo per 31 Desember 2018	5.379.109.730
Mutasi tambah	
Pembelian	1.568.466.164
Pengembangan nilai aset	94.600.574.942
Mutasi kurang	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(152.283.515)
Saldo per 31 Desember 2019	101.395.867.321

Mutasi tambah:

1. Pembelian : transaksi perolehan aset tetap dalam renovasi berupa Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi. Dan transaksi perolehan aset tetap lainnya berupa Monografi, Lukisan Kanvas, Ukiran Logam dan Sejenisnya, Lukisan Cat Air Serta Barang Bercorak Kesenian Lainnya
2. Pengembangan Nilai Aset: transaksi pengembangan (rehabilitasi/renovasi/restorasi) aset tetap dalam renovasi yang menambah nilai buku sebelumnya berupa rumah dinas Menteri PPN/Bappenas di Jalan Denpasar milik Kementerian Sekretariat Negara dan pekerjaan penataan ruang kerja Kementerian PPN/Bappenas di gedung sewa.

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada lampiran 9.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP)
Rp0,00

C.14. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Tabel 30 Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

(Dalam Rupiah)	
Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	-
Mutasi Tambah	-
Perolehan/Penambahan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Mutasi Kurang	-
Reklasifikasi KDP menjadi Aset Tetap	-
Saldo per 31 Desember 2019	-

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 31 Desember 2019.

Rincian lebih lanjut terkait Kontruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran 9.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(258.202.199.382,00)

C.15. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp258.202.199.382,00 dan Rp257.457.197.160,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019.

Tabel 31 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)				
No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	1.484.443.750.305	-	1.484.443.750.305
2	Peralatan dan Mesin	433.773.885.330	(236.258.194.736)	197.515.690.594
3	Gedung dan Bangunan	157.938.895.258	(18.832.558.857)	139.106.336.401
4	Jalan, Inggas dan Jaringan	6.020.002.506	(3.121.445.789)	2.898.556.717
6	Aset Tetap Lainnya	4.050.945.179	-	4.050.945.179
6	Aset Tetap Renovasi	97.304.922.142	-	97.304.922.142
7	Konstruksi Dalam pengerjaan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		2.141.879.385.781	(288.192.199.522)	1.924.376.161.409

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran 9.

Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp51.805.080,00

C.16. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing

sebesar Rp51.805.080,00 dan Rp0,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp(259.025,00)

C.17. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(259.025,00) dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	259.025	0,50%	1.295
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Masak	-	100%	-
Jumlah	259.025		1.295
Tagihan PPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Masak	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	259.025		1.295

Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga
Rp490.209.375.000,00

C.18. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp490.209.375.000,00 dan Rp83.647.500.000,00. Kenaikan nilai tersebut berasal dari hasil revaluasi Tahun 2017/2018 atas aset tanah yang digunakan oleh pihak ketiga yaitu PT Bakrie Swasakti Utama untuk pembangunan gedung Wisma Bakrie 2 dengan Perjanjian Bangun Guna Serah/BOT Nomor 4300/SES/09/2004, tanggal 24 September 2004 dengan jangka waktu 2005 - 2029.

Aset Tak Berwujud
Rp55.783.312.439,00

C.19. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp55.783.312.439,00 dan Rp49.586.947.884,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)		
No	Uraian	Nilai Buku
1	Software	40.691.725.067
2	Lisensi	6.091.587.352
Jumlah		55.783.312.439

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutasi aset Tak Berwujud pada Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut :

Tabel 34 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud

(Dalam Rupiah)	
Saldo per 31 Desember 2018	49.586.947.884
Mutasi tambah	
Koreksi Saldo Awal	12.003.613
Pengembangan Nilai Aset	572.220.000
Pembelian	12.526.976.304
Hibah	270.329.824
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.240.910.000
Pengembangan Melalui KDP	1.100.000.000
Mutasi keluar	
Transfer Keluar	(9.526.075.185)
Saldo per 31 Desember 2019	55.783.312.439
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2019	(35.825.335.474)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	19.957.976.965

Mutasi tambah:

1. Saldo Awal : transaksi perolehan Aset Tak Berwujud yang diperoleh tahun sebelumnya.
2. Pembelian : transaksi perolehan aset tak berwujud yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN.
3. Hibah (Masuk) : transaksi untuk membukukan perolehan BMN yang berasal dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat dan dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
4. Perolehan/Penambahan KDP → perolehan Barang Milik Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (termin) sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Mutasi Kurang :

1. Transfer Keluar : transaksi penghapusan aset tak berwujud pada Satuan Kerja Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation ke Satuan Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Rincian per eselon I disajikan pada lampiran 9.

Aset Tak Berwujud
dalam Pengerjaan
Rp0,00

C.20. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dan adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Terdapat mutasi tambah aset tak berwujud dalam pengerjaan Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 31 Desember 2019.

Tabel 35 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

(Dalam Rupiah)	
Saldo per 31 Desember 2018	-
Mutasi tambah	-
Perolehan/Penambahan KDP	-
Saldo per 31 Desember 2019	-

Mutasi tambah:

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan.

Rincian per eselon I disajikan pada lampiran 9.

C.21. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp68.180.544.422,00

Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp68.180.544.422,00 dan Rp62.680.178.299,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian PPN/Bappenas serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tabel 36 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)		
No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	68.180.544.422
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-
Jumlah		68.180.544.422

Adapun mutasi aset lainnya yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Mutasi Aset Lain-lain

(Dalam Rupiah)	
Saldo per 31 Desember 2018	62.680.178.299
Mutasi tambah	-
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya	20.986.281.104
Mutasi kurang	-
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(15.472.571.731)
	(13.343.250)
Saldo per 31 Desember 2019	68.180.544.422
Akumulasi Penyusutan	(6.977.126.803)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	61.203.417.619

Mutasi tambah:

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya: transaksi reklasifikasi yang disebabkan karena adanya Barang Milik Negara yang rusak berat dan akan diusulkan untuk penghapusan dengan cara pemindahtanganan.

Mutasi kurang:

Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola : Transaksi usulan Barang Rusak Berat yang sudah di usulkan penghapusan ke Pengelola Barang.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran 9 dan 10.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(Rp42.802.462.277,00)

C.22. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp42.802.462.277,00 dan Rp38.314.958.551,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	49,691,725,087	(39,538,223,962)	10,153,501,125
2	Lisensi	5,091,587,352	(2,287,111,512)	2,804,475,840
	Jumlah	54,783,312,439	(41,825,335,474)	12,957,976,965
B	Aset Lainnya			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	68,180,544,422	(6,977,126,803)	61,203,417,619
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan			
	Jumlah	68,180,544,422	(6,977,126,803)	61,203,417,619
	Total	122,963,856,861	(48,802,462,277)	74,161,394,584

Rincian akumulasi amortisasi aset tak berwujud disajikan pada lampiran 9.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp4.546.685.157,00

C.23. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp4.546.685.157,00 dan Rp21.715.821.483,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan pada lampiran 11.

Hibah Belum Disahkan Rp0,00

C.24. Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.824.966,00.

Rincian saldo hibah langsung yang belum disahkan dapat dilihat pada lampiran 3.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp197.392.416,00*

C.25. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp197.392.416,00 dan Rp200.409.583,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka disajikan pada lampiran 12.

*Uang Muka dari
KPPN
Rp38.136.194,00*

C.26. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp38.136.194,00 dan Rp205.713.244,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp2.629.750.217.776,00*

C.27. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.629.750.217.776,00 dan Rp1.606.311.148.017,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp526.895.890,00

Jumlah Pendapatan pada Kementerian PPN/Bappenas untuk periode yang berakhir pada tanggal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dan adalah masing-masing sebesar Rp526.895.890,00 dan Rp516.260.813,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 39 Perbandingan Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	135.423.365	124.906.953	8,42
Pendapatan dan Bangun, Guna dan Serah (BGS)	360.047.373	360.047.373	-
Jumlah Pendapatan dan Pengelolaan BMN	495.470.738	484.954.326	2,17
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	10.802	1.062.287	(99,00)
Jumlah Pendapatan Jasa	10.802	1.062.287	(99,00)
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.414.000	224.200	530,69
Pendapatan Denda Lainnya	30.000.000	30.000.000	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	526.895.540	516.260.813	2,06
Pendapatan Anggaran Lain-lain	350	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
Jumlah	526.895.890	516.260.813	2,06

Pendapatan dari Pengelolaan BMN-LO berasal dari dari sewa gedung koperasi, sewa ruang pelaksanaan ujian TPA.

Tabel 40 Perbandingan PNBP Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

Uraian Jenis Pendapatan	PNBP Lainnya-LO (Rp)	PNBP Lainnya-LRA (Rp)	Selisih
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN			
Pendapatan dan Pemindahalangan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	135.423.365	135.922.978	(499.313,00)
Pendapatan dan Bangun, Guna dan Serah (BGS)	360.047.373	360.047.373	-
Jumlah Pendapatan dan Pengelolaan BMN	495.470.738	495.970.051	(499.313,00)
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	10.802	10.802	-
Jumlah Pendapatan Jasa	10.802	10.802	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.414.000	1.638.200	(224.200,00)
Pendapatan Denda Lainnya	30.000.000	30.000.000	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	526.895.540	527.619.053	(723.513,00)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	350	350	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	526.895.890	527.619.403	(723.513,00)

Perhitungan selisih nilai dari tabel diatas adalah sebagai berikut.

Tabel 41 Selisih nilai PNBP Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

			(Dalam Rupiah)
Saldo PNBP Lainnya - LRA			527.619.403
Penambah			
1. Pengakuan pendapatan operasional Koperasi, Jumlah Balik koreksi, sewa ATM, sewa rumah dinas, sewa u	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	189.531.563	
2. Jurnal balik denda keterlambatan PT. Sumber Berkat Usaha Mandiri TA.2018 PPK P2SPAB (telah dibayar)	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	224.200	
Jumlah Penambah		189.755.763	
Pengurang			
1. Pengakuan pendapatan sewa ATM, kegiatan operasional Koperasi, Piutang sewa rumah dinas, dan jurnal balik sewa ATM dan kegiatan operasional koperasi	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	189.032.250	
Jumlah Pengurang		189.032.250	
Total Tambah/Kurang			723.513
Saldo Beban Pemadanan - LO			526.895.890

Beban Pegawai Rp
161,031,193,376,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp161.031.193.376,00 dan Rp.158.912.926.480,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 42 Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

				(Dalam Rupiah)
Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %	
Beban Gaji Pokok PNS	43.845.986.960	40.988.314.180	6,97	
Beban Pembulatan Gaji	644.426	561.639	14,74	
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	3.441.266.508	3.283.471.014	4,81	
Beban Tunjangan Anak PNS	786.536.047	797.022.840	(1,32)	
Beban Tunjangan Struktural	5.857.650.000	5.876.105.000	(0,31)	
Beban Tunjangan Fungsional PNS	2.781.965.000	2.677.940.000	3,88	
Beban Tunjangan PPh PNS	512.164.857	432.443.225	18,44	
Beban Tunjangan Beras PNS	1.921.012.920	1.955.774.520	(1,78)	
Beban Uang Makan PNS	4.365.800.000	4.836.203.000	(9,73)	
Beban Tunjangan Umum	688.590.000	606.880.000	13,45	
Beban Uang Lembur	362.684.050	364.675.000	(0,55)	
Beban Pegawai TK/Kegiatan	96.492.980.909	97.134.908.252	(0,66)	
Jumlah Beban Pegawai	161.057.281.677	158.954.298.670	1,32	
Pengembalian	(26.088.301)	(41.372.190)	(36,94)	
Jumlah	161.031.193.376	158.912.926.480	1,33	

Tabel 43 Perbandingan Beban Pegawai pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	43.845.986.960	43.796.268.560	49.718.400
Beban Pembulatan Gaji	644.426	637.135	7.291
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	3.441.266.508	3.437.173.628	4.092.880
Beban Tunjangan Anak PNS	786.536.047	785.495.059	1.040.988
Beban Tunjangan Struktural	5.857.650.000	5.848.505.000	9.145.000
Beban Tunjangan Fungsional PNS	2.781.965.000	2.764.405.000	17.560.000
Beban Tunjangan PPh PNS	512.164.857	510.884.177	1.280.680
Beban Tunjangan Beras PNS	1.921.012.920	1.921.012.920	-
Beban Uang Makan PNS	4.365.800.000	4.365.800.000	-
Beban Tunjangan Umum	688.590.000	688.205.000	385.000
Beban Uang Lembur	362.684.050	364.357.000	(1.672.950)
Beban Pegawai TK/Kegiatan	96.492.980.909	104.779.139.445	(8.286.158.536)
Jumlah Beban Pegawai	161.057.281.677	169.261.882.924	(8.204.601.247)
Pengembalian	(26.088.301)	(26.088.301)	-
Jumlah	161.031.193.376	169.235.794.623	(8.204.601.247)

Perhitungan selisih nilai dari tabel diatas adalah sebagai berikut.

Tabel 44 Selisih nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

Penambah		
1. Pembayaran kekurangan pembulatan gaji akrual Januari 2020 (Bank BNI Syariah dan Konvensional) dan kekurangan bulan Januari s.d Maret 2019	Beban Gaji Pokok PNS, Beban Pembulatan Gaji PNS, Beban Tunj. Suamistri PNS, Beban Tunj. Anak PNS	54.859.559
2. Pembayaran kekurangan tunjangan fungsional dan tunjangan struktural bulan November 2019, akrual Januari 2020 dan kekurangan bulan Januari s.d Maret 2019	Beban Tunj. Struktural PNS, Beban Tunj. Fungsional PNS	27.985.680
3. Pembayaran kekurangan tunjangan umum akrual Januari 2020 dan kekurangan bulan Januari s.d Maret 2019	Beban Tunjangan Umum PNS	385.000
4. Tunjangan kinerja Menteri Desember 2019	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	44.580.706
5. Akrual Tukin periode 19 s.d 31 Des 2019	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.143.424.346
6. Jurnal Baik an Putri Saraswati (Koreksi seharusnya TGR)	Beban Gaji Pokok PNS, Beban Pembulatan Gaji PNS	51.805.080
7. Jurnal Baik Salah Jurnal Tukin Menteri	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	44.580.706
Jumlah Penambah		2.367.621.077
Pengurang		
1. Pengembalian Belanja Pegawai an Putri Saraswati	Beban Gaji Pokok PNS, Beban Pembulatan Gaji PNS	51.805.080
2. Jurnal Baik Salah Jurnal Tukin Menteri	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	44.580.706
3. Jurnal Baik Pembayaran belanja pegawai tahun 2018 dibayarkan tahun 2019	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	10.474.163.588
4. Pengembalian TAYL 2019		1.572.950
Jumlah Pengurang		10.572.222.324
Total Tambah/Kurang		(8.204.601.247)
Saldo Beban Persediaan - LO		161.031.193.376

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp18.275.935.263,00

Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp18.275.935.263,00 dan Rp10.360.216.882,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 45 Perbandingan Rincian Beban Persediaan per per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Beban	(Dalam Rupiah)		
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	16.284.021.065	10.102.604.798	61,19
Beban Persediaan Pita Cukai, Material, Legas	1.050.000	15.887.300	(93,38)
Beban Persediaan Bahan Baku	351.245.380	4.949.390	6.998,74
Beban Persediaan Lainnya	1.639.618.818	230.787.394	592,41
Jumlah	18.275.935.263	10.360.216.882	76,30

Perhitungan Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Perbandingan Rincian Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

Uraian	(Dalam Rupiah)		
	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Persediaan Konsumsi	16.284.021.065	17.209.870.717	(925.849.652)
Beban Persediaan Pita Cukai, Material, Legas	1.050.000	11.693.250	(10.643.250)
Beban Persediaan Bahan Baku	351.245.380	-	351.245.380
Beban Persediaan Lainnya	1.639.618.818	-	1.639.618.818
Jumlah	18.275.935.263	17.221.663.967	1.054.271.296

Perhitungan selisih nilai dari tabel diatas adalah sebagai berikut.

Tabel 47 Selisih nilai Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Saldo Beban Persediaan - LRA		17.221.563.967
Penambah		
Pemakaian	Beban Persediaan Konsumsi	187.150.576
Jumlah Penambah		187.150.576
Pengurang		
Pemakaian	Beban Persediaan Konsumsi	16.470.508.791
	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	1.050.000
	Beban Persediaan Bahan Baku	351.245.380
	Beban Persediaan Lainnya	1.639.618.818
Opname Fisik	Beban Persediaan Konsumsi	662.850
SP2D Terbit	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	17.209.870.717
SP2D Terbit	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	11.693.250
Jumlah Pengurang		35.684.649.806
Total Tambah(Kurang)		(35.497.499.230)
Saldo Beban Persediaan - LO		(18.275.935.263)

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp1.585.356.306.021,00

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.585.356.306.021,00 dan Rp2.364.818.950.150,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas. Perbandingan rincian Beban Barang dan Jasa untuk per per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Langganan Daya dan Jasa	944.222.347	14.421.710.149	(93,45)
Beban Jasa Pos dan Giro	39.517.120	55.535.998	(28,84)
Beban Jasa Konsultan	1.044.764.439.052	1.926.048.564.646	(45,76)
Beban Jasa Profesi	37.302.182.110	24.284.884.027	53,60
Beban Jasa Lainnya	124.908.390.683	73.309.914.320	70,38
Beban Sewa	87.778.098.327	37.330.403.026	135,14
Beban Air, Listrik, Telepon	7.908.432.075	7.944.874.958	(0,46)
Beban Pengganti Pajak	-	5.632.424.060	(100,00)
Beban Barang Non Operasional	150.056.029.810	158.100.003.016	(5,09)
Beban Honor Output Kegiatan	30.497.403.500	41.137.622.649	(25,86)
Beban Bahan	55.241.816.131	46.128.895.802	19,76
Beban Barang Operasional	10.309.435.452	2.967.219.405	247,44
Beban Honor Operasional	4.552.471.000	4.446.813.000	2,38
Beban Pengiriman Surat Dinas	301.054.882	364.855.249	(17,49)
Beban Keperluan Perkantoran	30.863.796.477	22.635.127.311	35,35
Beban Barang Transito	-	300.000	(100,00)
Beban Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	298.612.555	110.354.220	170,59
Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN	22.000.000	-	-
Beban Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Beban	1.585.787.901.521	2.364.919.501.836	(32,95)
Pengembalian	(431.595.500)	(100.551.686)	329,23
Jumlah	1.585.356.306.021	2.364.818.950.150	(32,96)

Adapun perbandingan antara saldo Beban Barang dan Jasa pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Perbandingan Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Langganan Daya dan Jasa	944.222.347	927.859.946	16.362.401,00
Beban Jasa Pos dan Giro	39.517.120	39.517.120	-
Beban Jasa Konsultan	1.044.704.439.052	168.644.607.055	876.119.831.997,00
Beban Jasa Profesi	37.302.182.110	35.852.927.345	1.449.254.765,00
Beban Jasa Lainnya	124.908.390.683	125.360.889.019	(452.498.336,00)
Beban Sewa	87.778.098.327	87.854.197.369	(76.099.041,00)
Beban Air, Listrik, Telepon	7.908.432.075	7.875.232.540	33.199.539,00
Beban Pengganti Pajak	-	-	-
Beban Barang Non Operasional	150.056.029.810	164.902.714.105	(14.846.684.295,00)
Beban Honor Output Kegiatan	30.497.403.500	31.006.610.000	(509.206.500,00)
Beban Bahan	55.241.816.131	54.757.740.399	484.075.732,00
Beban Barang Operasional	10.309.435.452	10.299.536.452	9.900.000,00
Beban Honor Operasional	4.552.471.000	4.552.471.000	-
Beban Pengiriman Surat Dinas	301.054.882	301.054.882	-
Beban Keperluan Perkantoran	30.863.796.477	31.024.581.601	(160.785.124,00)
Beban Barang Transito	-	-	-
Beban Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	298.612.555	-	298.612.555,00
Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN	22.000.000	22.000.000	-
Beban Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Beban	1.585.787.901.521	723.421.877.832	862.366.023.689,00
Pengembalian	(431.595.500)	(431.595.500)	-
Jumlah	1.585.356.376.021	722.990.282.332	862.366.023.689,00

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Selisih nilai Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

			(Dalam Rupiah)
Saldo Belanja Barang dan Jasa - LRA			722.990.282.332
Penambah			
1. Belanja Hibah READSI (522119) bulan Oktober s.d. Desember 2019 (Belum Disahkan), Tagihan TV Kabel, Kesalahan MAK, Jurnal balik tagihan bulan Desember 2018 yang sudah dibayarkan TA 2019	Beban Langganan Daya dan Jasa	16.362.401	
2. MPHLBJS terbit, Jurnal balik belanja barang di TA 2018, Salah MAK jasa konsultan data center, SP3 yang belum terbit PPK PPN XI	Beban Jasa Konsultan	876.119.831.997	
3. Jurnal balik Koreksi SPHL Hibah READSI Akun 524119, Belanja Hibah READSI (524119) berdasarkan belanja bulan Oktober s.d. Desember 2019 (Belum Disahkan), Tunggakan belanja TA 2019	Beban Jasa Profesi	1.449.254.765	
4. Tagihan Telepon , Listrik, Tunggakan belanja TA 2019, Jurnal balik belanja barang di TA 2018	Beban Air, Listrik, Telepon	33.199.535	
5. Tunggakan belanja TA 2019, Koreksi SPHL Hibah READSI Akun 524119, Salah MAK PPN 5 (seharusnya belanja bahan), Salah MAK Peralatan mesin ke belanja bahan, Jurnal balik belanja barang di TA. 2018 PPK PPN 6	Beban Bahan	484.075.732	
6. Tunggakan belanja TA, 2019 PPK PPN 10, Belanja Hibah READSI (521119) bulan Oktober s.d. Desember 2019 (Belum Disahkan)	Beban Barang Operasional	9.900.000	
7. Koreksi aset ekstrakomtabel hibah READSI, Aset ekstrakomtabel Satker Bappenas dan KNKS	Beban Ekstrakomtabel Peralatan & Mesin	298.612.555	
Jumlah Penambah		878.411.236.985	
Pengurang			
1. Tunggakan belanja TA 2019, Belanja Hibah READSI (521111) berdasarkan belanja bulan Oktober s.d. Desember 2019 (Belum Disahkan), Proyek READSI IFAD No Register 2KCIY8LA yang belum disahkan	Beban Keperluan Kantor	160.785.124	
2. Pengembalian TAYL 2019, Belanja Hibah READSI (522191) bulan Oktober s.d. Desember 2019 (Belum Disahkan), Jurnal balik belanja barang di TA. 2018	Beban Jasa Lainnya	452.498.336	
3. Belanja Hibah READSI (522141) bulan Oktober s.d. Desember 2019 (Belum Disahkan), Jurnal balik kekurangan pembayaran sewa gudang ICCTF, Jurnal balik belanja barang di TA. 2018, Tunggakan Belanja TA 2019	Beban Sewa	76.039.041	
4. Koreksi karyasiswa Linkage Premium, Karyasiswa program PHRD IV-Premium tahun 2020, Karyasiswa program PHRD IV-II tahun 2020, Karyasiswa program Coremap tahun 2020, Koreksi karyasiswa Coremap dan PHRD IV, Jurnal balik atas pembayaran karyasiswa program linkage Unhas-Australia multiyears dan PHRD TA 2018	Beban Barang Non Operasional	14.846.684.295	
5. SSBP Bulan Februari 2020, Pengembalian TAYL 2019, Jurnal balik belanja barang di TA, 2018	Beban Honor Output Kegiatan	509.206.500	
Jumlah Pengurang		16.045.213.296	
Total Tambah/Kurang			862.366.023.689
Saldo Beban Persediaan - LO			1.585.356.306.021

Beban Pemeliharaan
Rp17.541.575.727,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp17.541.575.727,00 dan Rp9.760.589.060,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.601.273.800	6.077.775.170	(7,84)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.825.645.162	9.479.384.890	14,20
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	451.290.000	1.642.211.800	(72,52)
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus	33.752.771	5.994.289	463,08
Beban Pemeliharaan Lainnya	350.000	32.499.940	(98,92)
Beban Persediaan Suku Cadang	59.615.546	13.573.300	339,21
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	569.648.448	536.140.951	6,25
Jumlah Beban	17.541.575.727	17.787.580.340	(1,38)
Pengembalian	-	(317.761.766)	(100,00)
Jumlah	17.541.575.727	17.469.818.574	0,41

Adapun perbandingan antara saldo Beban Pemeliharaan pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 52 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.601.273.800	5.601.273.800	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.825.645.162	11.186.876.533	(361.231.371)
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	8.252.000	(8.252.000)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	451.290.000	451.290.000	-
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus	33.752.771	33.752.771	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	350.000	-	350.000
Beban Persediaan Suku Cadang	59.615.546	-	59.615.546
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	569.648.448	-	569.648.448
Jumlah Beban	17.541.575.727	17.281.445.104	260.130.623
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	17.541.575.727	17.281.445.104	260.130.623

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 53 Selisih nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Saldo Belanja Pemeliharaan-LRA			17.281.445.104
Penambah			
Pemakaian	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.097.000	
	Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	569.648.448	
	Beban Persediaan Suku Cadang	59.615.546	
		350.000	
Koreksi	Beban Pemeliharaan Lainnya		
Jumlah Penambah		671.710.994	
Pengurang			
Pemakaian	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	403.328.371	
	Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.252.000	
Persediaan telah tercatat di SIMAK BMN			
Jumlah Pengurang		411.580.371	
Total Tambah(Kurang)			260.130.623
Saldo Beban Persediaan - LO			17.541.574.727

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp365.843.175.874,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp365.843.175.874,00 dan Rp314.615.332.977,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 54 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	145.240.786.382	121.348.223.772	19,69
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.143.618.981	3.519.394.410	(10,68)
	81.186.667.460	62.424.882.392	30,05
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	105.383.292.221	108.403.442.382	(2,79)
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	19.162.386.130	16.258.224.148	17,86
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	16.382.982.038	6.700.308.877	144,51
Jumlah Beban	370.499.733.212	318.654.475.981	16,27
Pengembalian	(4.656.557.338)	(4.039.143.004)	15,29
Jumlah	365.843.175.874	314.615.332.977	16,28

Adapun perbandingan antara saldo Beban Perjalanan Dinas pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 55 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	145.240.786.382	145.155.085.921	85.700.461
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.143.618.981	3.127.506.481	16.112.500
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81.186.667.460	81.221.007.960	(34.340.500)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	105.383.292.221	104.988.403.686	394.888.535
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	19.162.386.130	19.253.199.714	(90.813.584)
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	16.382.982.038	16.502.259.239	(119.277.201)
Jumlah Beban	370.499.733.212	370.247.463.001	252.270.211
Pengembalian	(4.656.557.338)	(4.656.557.338)	-
Jumlah	365.843.175.874	365.590.905.663	252.270.211

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 56 Selisih Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal Belanja Perjalanan Dinas-LRA		366.999.720.663
Penambah		
Tunggakan		304.056.581
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67.054.500
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	200.065.335
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.300.000
Jurnal Balik	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	211.450.000
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000
Koreksi (Salah MAK)	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.812.500
Jurnal READSI	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.408.815.500
Jumlah Penambah		2.208.304.416
Pengurang		
SSBP	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	85.027.000
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.387.244
Pengembalian TAYL		456.847.924
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.145.000
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	153.886.001
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23.873.040
Jurnal Koreksi		6.511.496
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	706.000
Jurnal Balik	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.502.465.500
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	100.000.000
Jumlah Pengurang		3.364.849.205
Total Tambah (Kurang)		(1.156.544.789)
Saldo Beban Perjalanan Dinas - LO		365.843.175.874

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp903.122.004.477,00

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp903.122.004.477,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 57 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	2.906.836.648	-	-
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	4.294.617.114	-	-
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	808.053.874.347	-	-
Beban Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	66.769.607.066	-	-
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	21.097.069.302	-	-
Jumlah	903.122.004.477		

Tabel 58 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO	LRA	Selisih
Beban Barang Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	2.906.836.648	-	2.906.836.648
Beban Barang Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	4.294.617.114	-	4.294.617.114
Beban Barang Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	808.053.874.347	1.120.333.300	806.933.541.047
Beban Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	66.769.607.066	1.141.104.813	65.628.502.253
Beban Barang Fisik Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	-	2.978.884.800	(2.978.884.800)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	21.097.069.302	-	21.097.069.302
Jumlah	903.122.004.477	5.240.322.913	897.881.681.564

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 59 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Saldo Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat - LRA			5.240.322.913
Penambah			
1 Jurnal Otomatis BMN	Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	2.906.836.648	
2 Jurnal Otomatis BMN	Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	4.294.617.114	
3 Jurnal Otomatis BMN	Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	808.053.874.347	
4 Jurnal Otomatis BMN	Beban Persediaan Aset Lain-lain untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	66.769.607.066	
5 Jurnal Otomatis BMN	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	21.097.069.302	
Jumlah Penambah		903.122.004.477	
Pengurang			
1 SP2D terbit nomor 191400507900001 dan	Belanja Peralatan Dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	1.120.333.300	
2 SP2D terbit nomor 190191382022474, 191400507900001, dan 191400507920002	Belanja Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	1.141.104.813	
3 SP2D terbit nomor 191400507900001 dan 191400507920002	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	2.978.884.800	
Jumlah Pengurang		5.240.322.913	
Total Tambah/Kurang			897.881.681.564
Saldo Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat - LO			903.122.004.477

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp68.644.464.941,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp68.644.464.941,00 dan Rp65.496.481.486,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 60 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	55.234.487.984	51.783.701.729	6,86
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.723.303.038	6.656.171.603	16,03
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	181.345.015	218.072.844	(16,84)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	741.614.013	30.253.103	2.351,37
Jumlah Penyusutan	63.880.760.030	58.688.199.279	8,85
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	4.763.704.911	6.808.282.207	(30,03)
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	4.763.704.911	6.808.282.207	(30,03)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	68.644.464.941	65.496.481.486	4,81

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp259,025,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp259,025,00 dan Rp107.638,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 61 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan	-	90.056	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	259.025	-	-
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	17.582	-
Jumlah Penyisihan	259.025	107.638	140,64

D.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Rp1.023.539.644,00

Pendapatan pelepasan aset non lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.023.539.644,00 dan Rp3.310.578.340,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 62 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	Desember 2019	Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	991.150.756	45.100.000	2.050,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	32.388.888	3.264.478.340	(3.232.089.452)
Jumlah	1.023.539.644	3.310.578.340	(10.232.087.402,00)

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 63 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	991.150.756	991.150.756	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	32.388.888	32.388.888	-
Jumlah	1.023.539.644	1.023.539.644	-

D.11. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp461.465.409,00

Beban dari pelepasan aset non lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp461.465.409,00 dan Rp49.500.000,00.

D.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp15.958.915.433,00

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp15.958.915.433,00 dan Rp1.115.517.022.144,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	36.389.578	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.270.441.023	1.768.745.319	84,90
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	37.445.535	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	12.562.834.217	1.113.718.257.718	(98,87)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Negara	51.805.080	30.019.107	72,57
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	-	-
Jumlah	15.958.915.433	1.115.917.022.144	88,60

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 65 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	36,389,578	36,389,578	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3,270,441,023	3,270,441,023	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	37,445,535	37,445,535	-
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Rugi Kerugian Negara	51,805,080	-	51,805,080
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	12,562,834,217	-	12,562,834,217
Jumlah	18,958,915,433	3,344,276,136	12,614,639,297,00

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 66 Selisih Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LRA		3,344,276,136
Penambah		
Jurnal Otomatis BMN	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	12,562,834,217
TGR atas nama Putri Saraswati	Pendapatan Penyelesaian Kerugian Negara	51,805,080
Jumlah Penambah		12,614,639,297
Pengurang		
Jumlah Pengurang		-
Total Tambah/Kurang		12,614,639,297
Saldo Bahan Persediaan - LO		18,958,915,433

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp 14.482.630.961,00

D.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp14.482.630.961,00 dan Rp1.112.403.779.740,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	14,237,560,823	394,369,316	3,510,21
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	245,070,138	-	-
Jumlah	14,482,630,961	394,369,316	3,510,21

Tabel 68 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya antara LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO	LRA	Selisih
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	14,237,560,823	-	14,237,560,823,00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	245,070,138	-	245,070,138,00
Jumlah	14,482,630,961	-	14,237,560,823,00

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.14. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp1.606.311.148.017,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.606.311.148.017,00 dan Rp1.366.285.820.528,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp(3.117.249.660.107,00)

Jumlah (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(3.117.249.660.107,00) dan Rp(2.924.783.254.630,00).

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas
Rp1.733.431.226.092,00

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.733.431.226.092,00 dan Rp127.695.483.155,00.

Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari :

Tabel 69 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

(Dalam Rupiah)

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	Nilai
Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-
Penyesuaian Nilai Aset	-
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi atas Reklasifikasi	(13.638.230.904)
Selisih Revaluasi Aset	1.342.010.649.166
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	407.852.279.839
Koreksi Lain-lain	(2.793.472.009)
Jumlah	1.733.431.226.092

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00

Selisih Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp127.120.422.226,00.

E.3.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi
(Rp13.638.230.904,00)

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(13.638.230.904,00) dan Rp0,00.

Tabel 70 Rincian Koreksi atas Reklasifikasi

(Dalam Rupiah)	
Satker	Nilai
MWA ICCTF	(246.607.005)
MCC	13.864.837.909
Jumlah	13.638.230.904

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset
Rp1.342.010.649.166,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2019 merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian kembali Aset Tetap yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018 dan hasil koreksi/perbaikan pada tahun 2019. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.342.010.649.166,00 dan Rp0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut dari penilaian kembali atas Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp407.852.279.839,00

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp407.852.279.839,00 dan Rp1.687.230.149,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari :

Tabel 71 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	Nilai
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.323.834.573
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	406.528.445.266
Jumlah	407.852.279.839

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per Satker terdiri dari :

Tabel 72 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)		
No	Satker	Nilai
1	Bappenas	715.454.673
2	MCC	4.421.497.367
3	Satker Konsolidasi	(3.813.117.467)
	Jumlah	1.323.834.573

Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per Satker terdiri dari :

Tabel 73 Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Bappenas	(5.690.637)
2	MCC	(27.739.097)
3	Satker Konsolidasi	406.561.875.000
Jumlah		406.528.445.266

Satker Konsolidasi merupakan Satker sementara untuk menampung pembatalan nilai revaluasi Aset sesuai dengan kebijakan nasional.

Koreksi Lain-Lain
Rp
(2.793.472.009,00)

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(2.793.472.009,00) dan Rp(1.112.169.220,00). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp
2.407.257.503.774,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.407.257.503.774,00 dan Rp3.037.113.098.964,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari

Tabel 74 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
(Dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima Dari Entitas Lain	(4.895.435.183)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.538.268.769.112
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	(26.154.967.366)
Pengesahan Hibah Langsung	902.016.992.846
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(1.977.855.635)
Jumlah	2.407.257.503.774

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember

2019, DDEL sebesar Rp(4.895.435.183,00) sedangkan DKEL sebesar Rp1.538.268.769.112,00.

Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per Satker terdiri dari :

Diterima dari Entitas Lain
(Rp4.895.435.183,00)

Tabel 75 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per Satker

Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp1.538.268.769.112,00,00

Uraian	Jumlah
Bappenas	-4.694.714.941
Bappeda Provinsi Sulawesi Barat	-2.385.000
Bappeda Provinsi DIY	-10.802
ICCTF	-299.000
MCC	-198.025.440
Jumlah	(4.895.435.183)

Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain(DKEL) per Satker terdiri dari :

Tabel 76 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per Satker

(Dalam Rupiah)

Satker	Nilai
KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS	1.420.090.347.994
Bappeda Provinsi Jawa Tengah	1.128.034.316
Bappeda Provinsi DIY	768.091.550
Bappeda Provinsi Jawa Timur	369.394.549
BAPPEDA PROVINSI ACEH	232.470.217
Bappeda Provinsi Sumatera Utara	879.060.200
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	937.596.887
BAPPEDA PROVINSI RIAU	962.347.965
BAPPEDA PROVINSI JAMBI	910.957.122
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	1.096.247.632
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	1.411.433.795
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	893.712.632
BAPPEDA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	499.612.373
Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	715.166.400
BAPPEDA PROP KAL-TIM	979.564.700
Bappeda Provinsi Sulawesi Utara	1.350.857.142
Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	1.202.685.300
Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan	492.906.193
Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	954.198.312
BAPPEDA PROVINSI MALUKU	1.358.694.281
Bappeda Provinsi Bali	505.629.588
BAPPEDA PROV. NUSA TENGGARA BARAT	869.826.033
Bappeda Provinsi NTT	1.294.846.190
Bappeda Provinsi Papua	1.252.891.000
Bappeda Provinsi Bengkulu	884.205.017
BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	1.063.585.594
BAPPEDA PROVINSI BANTEN	656.422.100
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	843.039.790
Bappeda Provinsi Gorontalo	1.265.641.774
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	911.613.856
Bappeda Provinsi Papua Barat	526.672.717
Bappeda Provinsi Sulawesi Barat	1.042.731.643
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	1.209.430.362
KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH	56.206.461.993
Pengelola Hibah MCC	14.911.015.936
Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	17.591.375.959
Jumlah	1.538.268.769.112

Nilai DKEL sebesar Rp1.538.268.769.112,00 berasal dari seluruh transaksi yang telah terbit SP2D dikurangi pengembaliannya (SSPB). Sedangkan nilai DDEL sebesar Rp(4.895.435.183,00) merupakan seluruh setoran penerimaan ke Bendahara Umum Negara melalui setoran SSPB.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk
Rp0,00 / Transfer
Keluar Rp
(26.154.967.366,00)

Transfer masuk/transfer keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(26.154.967.366,00).

Rincian Transfer Masuk/Transfer Keluar diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 77 Rincian Transfer Masuk per Satker

Satker	Nilai
Jumlah	-

Tabel 78 Rincian Transfer Keluar per Satker

Satker	Nilai
MCC	(25.720.272.430)
Bappenas	(434.694.936)
Jumlah	(26.154.967.366)

Nilai Transfer Keluar sebesar (Rp26.154.967.366,00) merupakan :

1. Alih status dari Satker Bappenas kepada BLU (Universitas Kuala Syiah dan Universitas Brawijaya)
2. Alih status dari Satuan Kerja Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan
Hibah
Langsung
Rp902.016.992.846,00

Pengesahan
Pengembalian
Hibah Langsung
Rp
(1.977.855.635,00)

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp902.016.992.846,00 sedangkan untuk Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(1.977.855.635,00).

Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker adalah sebagai berikut.

Tabel 79 Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker
(Dalam Rupiah)

Satker	Nilai
Bappenas	896.044.609.337
ICCTF	5.972.383.509
Jumlah	902.016.992.846

Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung adalah sebagai berikut.

Tabel 80 Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per Satker
(Dalam Rupiah)

Satker	Nilai
Bappenas	(1.977.855.635)
Jumlah	(1.977.855.635)

Ekuitas Akhir Rp
2.629.750.217.776,00

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.629.750.217.776,00 dan Rp1.366.285.820.528,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

*Kejadian –
Kejadian Penting
Setelah Tanggal
Neraca*

F.1. Rekening Pemerintah

Dalam penyelenggaraan Bagian Anggaran 055, satuan kerja pusat/KP memiliki 4 rekening bendahara pengeluaran dan 20 rekening bendahara pengeluaran pembantu yang digunakan dan dipertahankan sedangkan pada satuan kerja Dekonsentrasi/DK memiliki 32 rekening bendahara pengeluaran yang digunakan dan dipertahankan. Rincian rekening pemerintah sebagaimana tersaji pada lampiran 14.

Selain tersebut diatas, berdasarkan hasil rekonsiliasi rekening dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Kementerian PPN/Bappenas dalam BA 055 juga memiliki 7 rekening lainnya dari Satker Bappenas dan Satker MWA ICCTF. Rincian rekening lainnya sebagaimana tersaji pada lampiran 15.

*Pengungkapan
Lain-lain*

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Selain data keuangan yang telah diungkapkan diatas, terdapat beberapa informasi terkait data keuangan dan non keuangan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA 2019 Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019 disusun berbasis akrual dan menggunakan aplikasi dari Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
2. Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan bulan Desember tahun 2019 melakukan 4 (empat) kali revisi DIPA dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Realokasi kegiatan dari Direktorat;
 - b. Realokasi anggaran Tunjangan Kinerja;
 - c. Penambahan hibah
 - d. Realokasi anggaran ke seluruh Direktorat
3. Rekomendasi atas Temuan BPK atas Laporan Keuangan Tahunan TA 2018 masih dalam proses tindak lanjut sebagaimana terlampir dalam lampiran 21.

4. Indikasi Konvergensi Implementasi Kegiatan *Stunting* DIPA Bappenas

Tabel 81 Indikasi Konvergensi Implementasi Kegiatan *Stunting* DIPA Bappenas

No (a)	Program/Kegiatan/Output (b)		Pagu (c)	Realisasi (d)	% (e)
055 01 06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional				
	2937	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat			
	608	Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan			
		Komp. 640 Koordinasi Strategis Gerakan dan Percepatan Perbaikan Gizi	845	779,93	92%
		D. Hibah Investing in Nutrition and Early Years Project (INEY)	13.684	6.210	45%

Beberapa capaian utama kegiatan antara lain: (a) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PG di tingkat K/L tahun 2018 dan semester 1 tahun 2019; (b) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG di tingkat daerah (regional barat serta tengah dan timur); (c) pendampingan penyusunan RAD-PG di daerah; (d) penyusunan ringkasan output K/L TA 2019 yang mendukung percepatan penurunan *stunting*; (e) penentuan lokasi fokus prioritas percepatan penurunan *stunting* tahun 2019 dan 2020; (f) penyusunan Rancangan Perpres Percepatan Penurunan *Stunting*; (g) rewiu penajaman intervensi sensitif penurunan *stunting*; (h) penyusunan modul pelatihan aksi integrasi intervensi penurunan *stunting*; (i) pengembangan dashboard monitoring program percepatan penurunan *stunting*; (j) rencana pengembangan sistem penandaan tematik *stunting* pada KRISNA; (k) pemutakhiran Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Petunjuk Teknis Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota; (l) rewiu kinerja anggaran dan pembangunan semester 1 program percepatan penurunan *stunting*; (m) pendampingan dan bimbingan teknis ke daerah untuk pelaksanaan aksi integrasi; (n) penyusunan kriteria praktik baik intervensi penurunan *stunting*; (o) workshop pemanfaatan DAK tematik *stunting*; (p) analisis data *stunting* dan determinannya; dan (q)

- pemetaan penelitian terkait *stunting*; dan (r) Scaling Up Nutrition (SUN) Indonesia Annual Meeting 2019.
5. Penyerapan anggaran bersumber dari hibah INEY di bawah 50 persen karena proses revisi DIPA untuk memasukkan komponen hibah INEY baru terbit pada bulan Maret 2019 sehingga pelaksanaan kegiatan mundur dari waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, proses pengadaan Administrative Service Firm (ASF) dan tenaga ahli/konsultan di bawah pengelolaan ASF juga memerlukan waktu. Firma ASF baru terkontrak per 31 Juli 2019 dan baru 5 (lima) dari 14 posisi tenaga ahli/konsultan yang sudah terkontrak per Oktober 2019 yaitu Tenaga Ahli Dokumentasi Praktik Baik, Tenaga Ahli Kebijakan Gizi, Tenaga Analis Sistem, Tenaga Analis Data, dan Tenaga Asisten Penelitian dan Pengembangan. Hal ini juga menyebabkan pelaksanaan kegiatan di tahun 2019 belum optimal.
 6. Terdapat Tuntutan Hukum kepada Bappenas yang tercantum dalam Nomor Perkara : 318.PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang pokok gugatannya adalah Perbuatan Melawan hukum (PMH) oleh penyelenggaraan negara dalam hal pelaksanaan ganti rugi harta benda materiil dan immateriil pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999. Penggugat Terguga adalah Masyarakat Maluku-Maluku Utara yang diwakili oleh Syamsuri Launa sedangkan pihak tergugat adalah :
 - a. Presiden RI (Tergugat 1/T1);
 - b. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Tergugat 2/T2);
 - c. Menteri Sosial (Tergugat 3/T3);
 - d. Gubernur Maluku (Tergugat 4/T4);
 - e. Gubernur Maluku Utara (Tergugat 5/T5);
 - f. Gubernur Sulawesi Tenggara (Tergugat 6/T6);
 - g. Menteri Keuangan (Tergugat 7/T7);
 - h. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Tergugat 8/T8);
 - i. Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (Tergugat 9/T9);
 - j. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Tergugat 10/T10);
 - k. Menteri Koordinator Perekonomian (Tergugat 11/T11).

Status gugatan bersifat Inkracht yang bernilai materiil sebesar RP. 110.744.438.640.000.

Potensi pengeluaran Negara bernilai Rp 3.994.523.616.000 (Rp 3.944.514.500.000 + Rp 6.116.000 + Rp 500.000 + Rp 2.500.000).

Amar Putusan antara lain Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan X:

- a. Menteri Sosial Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial Republik Indonesia,
- b. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Dahulu Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal),
- c. Gubernur Maluku Utara,
- d. Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,
- e. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,
- f. Menteri Keuangan Republik Indonesia,
- g. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,
- h. Gubernur Provinsi Maluku,
- i. Gubernur Sulawesi Tenggara,
- j. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan (Menko Polhukam), tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan X untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

7. Per 31 Desember 2019 terdapat persediaan berupa peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke masyarakat pada Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation tidak disajikan dalam neraca karena sudah tidak berada dalam penguasaan dan dalam proses mendapatkan persetujuan pemindahtanganan dari Pengelola Barang sesuai PMK Nomor 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pasal 47, yaitu Program Compact dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sedang dalam proses persetujuan presiden senilai Rp580.108.270.754 (lima ratus delapan puluh triliun seratus

delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu).

- b. Sedang dalam proses serah terima dan penghapusan senilai Rp19.825.611.160 (sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus sebelas ribu seratus enam puluh).
8. Terdapat Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II NUP 13 yang berlokasi di Kelurahan Jati Sari Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa SHP No. 07 seluas 12.000 m² yang telah dilakukan revaluasi pada bulan Januari 2020 dan menghasilkan LPK 001/1/1MKN.07/KNL.01/01.00/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang menghasilkan nilai wajar baru yaitu sebesar Rp58.011.750.000,00. Sehingga terdapat koreksi nilai wajar sebesar Rp57.006.925.635,00 yang belum tercatat pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 (Audited).